

ABSTRAKSI

Skripsi yang berjudul *Perkembangan Musik Populer di Indonesia 1950 – 1998* membahas tentang musik populer dan kaitannya dengan dunia politik di Indonesia. Musik, yang termasuk salah satu cabang seni dan kebudayaan, mempunyai kaitan erat dengan aspek-aspek di sekelilingnya. Salah satu aspek tersebut adalah aspek politik. Skripsi ini menganalisa mengenai perkembangan musik populer pada masa Presiden Soekarno dan Soeharto serta respon kedua pemerintahan tersebut.

Musik populer, yang mulai berkembang menjadi sebuah industri pada dekade 1950-an, menjadi sebuah media dalam pencarian identitas nasional pada pemerintahan Soekarno. Oleh karena itu, pelarangan terhadap musik populer yang berasal dari Barat dilakukan oleh pemerintah Soekarno pada dekade 1960-an. Pergantian pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto membawa angin segar bagi perkembangan musik populer di Indonesia. Musik-musik Barat yang dilarang pada pemerintahan Soekarno bebas dimainkan pada era Soeharto. Pada dekade 1980-an, kebijakan pemerintah terhadap musik populer mulai berubah seiring makin mencengkeramnya ideologi pembangunan pada masa pemerintahan Soeharto. Pengecaman terhadap *dangdut* dan *pop* cengeng pada dekade 1980-an dan 1990-an mewarnai perkembangan musik populer di Indonesia.

Industri, yang erat kaitannya dengan musik populer, mulai mendapatkan tantangan pada akhir dekade 1970-an. Tantangan tersebut berupa pembajakan kaset yang semakin meluas di Indonesia. Pada akhir dekade 1980-an, hal tersebut mulai menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pada dekade 1990-an, pembajakan tetap marak seiring dengan adanya teknologi baru dalam proses perekaman musik.

Kata kunci : musik, politik Indonesia, Soekarno, Soeharto.

ABSTRACT

The research entitled "*The Development of Popular Music in Indonesia 1950 – 1998*" describes about the popular music and its relation to political aspect in Indonesia. Music, which is one of the kinds of art and culture, has close relation with aspects surrounding it. One of those aspects is politics. This research analyzes the developments of popular music along with the government's response in Soekarno and Soeharto era.

Popular music, which grow as an industry in the 1950's, is become a media for the discovery of national identity in Soekarno's era. Therefore, Soekarno prohibited western popular music to be played in 1960's. The shift of change in governmental area from Soekarno to Soeharto brings fresh start to the development of popular music in Indonesia. Western music, which is prohibited in Soekarno's era, is freely played in Soeharto's era. In the 1980's, government changed its policy regarding popular music. The doctrine of "development" is the main reason for the government to change its policy. The prohibition of *dangdut* and weepy *pop* music are one of the cases happened at Suharto's era regarding its policy in popular music.

Industry, which closely related to popular music, started to face its challenge in the end of 1970's. That challenge is called piracy. In the end Of the 1980's, government seriously divert their attention to piracy. In the 1990's, piracy still happened in Indonesia, along with the existence of new technology.

Keywords: music, Indonesian politics, Soekarno, Suharto.